



**TUGAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN CILACAP**

Wahyuni Setyo Kurniasari, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : Wahyunisetyo26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat kebijakan strategis dalam upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berupa strategi pengembangan produk, strategi pemasaran dan promosi, strategi pengembangan sumberdaya manusia, strategi pengembangan kelembagaan, strategi pengembangan investasi dan pembiayaan. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, upaya tersebut meliputi pembangunan gazebo kompleks wisata THR dan benteng pendem, pembuatan lapangan voly pantai depan objek wisata benteng pendem, pavingisasi jogging track objek wisata pantai Congok Jetis Kec.Nusawungu, Pedestrian tanggul teluk penyu, pembangunan gedung IPTEK tahap I, pembangunan kios pedagang diteluk penyu, pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata. Upaya yang dilakukan lebih meningkatkan penyediaan fasilitas secara fisik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Pemerintah Kabupaten Cilacap masih harus memperbaiki kinerja agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sejauh ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

Kata kunci : dinas pariwisata, pengembangan objek wisata

Abstract

This study aims to determine the tasks, obstacles and the efforts of the Department of Tourism and Culture in the development of attractions in Cilacap. The results showed that the Department of Tourism and Culture to make strategic policy in the development of attractions in Cilacap. Strategic Policy Cilacap District Government in the form of strategic product development, marketing and promotion strategy, the strategy of human resource development, institutional development strategy, investment and financing development strategies. There are various efforts made by the Department of Tourism and Culture, these efforts include the construction of tourist complex gazebo THR and Pendem Castle, the manufacture of the front beach voly field attraction Pendem Castle, jogging track pavingisasi attraction Congok Jetis beach Kec.Nusawungu, Pedestrian embankment turtle bay, science and technology building the first phase, the construction of kiosks diteluk turtle, maintenance of facilities and infrastructure of attractions. Efforts are being made further improve the provision of physical facility that can be offered to tourists. Government of Cilacap still have to improve the performance in order to overcome the obstacles that arise in the development of attractions in Cilacap. Implementation of duties of Tourism and Culture of Cilacap so far in accordance with the rules of existing legislation.

Keywords : department of tourism, tourism development

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan keindahan alam. Tidak hanya keindahan alam yang melimpah, tetapi juga mempunyai daya tarik yang sangat

mengagumkan. Keadaan flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi usaha penangan dan peningkatan kepariwisataan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara, setiap daerah diberi hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu negara. Pariwisata juga dapat dijadikan sebagai pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Dengan adanya pariwisata, lebih dikhususkan untuk pemerintahan daerah, dimana pariwisata mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.¹

Kabupaten Cilacap tercatat memiliki beberapa objek wisata yang kerap dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Adapun objek wisata Kabupaten Cilacap yang dapat dikunjungi adalah : Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendhem, Gunung

Srandil, Pantai Widara Payung, dan lain-lain.

Kabupaten Cilacap memilih urusan pilihan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap yang terdapat dalam Pasal 19 tentang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten. Baik itu di bidang perencanaan, keuangan, umum, sarana dan objek wisata, jasa sarana wisata, pengembangan objek wisata, promosi pariwisata, dan daya tarik wisata.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan selama 3 tahun terakhir, dalam sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap nampaknya belum berkembang dan dikembangkan secara optimal.² Kunjungan wisatawan selama 3 tahun terakhir Tahun 2013-2015 telah mengalami penurunan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa

¹ Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, (Jakarta: UI Press 1996), hlm. 6.

² <http://pariwisata.cilapkab.go.id/>

faktor, seperti : kurang dikenalnya objek wisata Kabupaten Cilacap di kalangan masyarakat luas, kurangnya penanganan sarana dan prasarana yang serius, serta fasilitas yang belum terpenuhi terutama dalam penyediaan fasilitas secara fisik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masih rendahnya fasilitas unggulan yang dapat ditawarkan pada wisatawan.

Perlu disadari oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang sangat berperan penting dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Pemerintah daerah telah membuat strategi guna pengembangan pariwisata di Kabupaten Cilacap. Untuk itu perlu diketahui apakah strategi pemerintah daerah tersebut sudah tepat sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terkait dengan Tugas Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap?

II. METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dijelaskan dengan cara metode kualitatif sehingga mampu

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penelitian hukum dan untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metodologi yang baik agar dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya. Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Ronny Hanitijo menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.³

Metode pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan dengan menggunakan penerapan norma serta aturan hukum yang ada.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam

³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm.11

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴

Metode deskriptif analitis digunakan peneliti karena peneliti akan memberikan gambaran melalui uraian secara analitis, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian saya melalui pendekatan yuridis normatif. Maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
 5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

1. Hasil karya ilmiah para sarjana
 2. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang terdiri dari
1. Kamus hukum
 2. Kamus ilmiah populer
 3. Internet

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.⁵ Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan hasil studi lapangan.

Data-data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap

1. Konsep Pengembangan

⁴ Soerjono Soekanto, op.cit.hlm.10

⁵ Soerjono Soekanto, op.cit. hlm.64

⁶ *Ibid*, halaman 116

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Cilacap dapat ditetapkan dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu trend kepariwisataan, permasalahan dan paradigma yang berkembang di masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism development), yakni pendekatan pengembangan pariwisata yang didasarkan pada seluruh potensi, sumberdaya dan partisipasi masyarakat lokal menjadi pilihan yang tepat. Paradigma pariwisata berbasis masyarakat dipilih sesuai dengan kondisi objektif sumberdaya pariwisata di Kabupaten Cilacap. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1. Jenis objek wisata potensial (alam dan budaya) sangat terkait dengan kehidupan nyata masyarakat.
2. Persebaran keruangan (spasial) objek tersebut relatif cukup merata, sehingga pengembangannya menuntut partisipasi aktif masyarakat.
3. Masyarakat merupakan pelaku inti dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata, mulai dari aktivitas penangkapan dan pemeliharaan ikan, aktivitas pertanian, penyediaan sarana transportasi, sampai pada pengelolaan desa-desa wisata dan bangunan bersejarah

Mempertimbangkan kondisi seperti itu maka paradigma pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tadi dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha-usaha pariwisata berskala kecil dan menengah. Sesuai dengan kondisi nyata sumberdaya pariwisata Kabupaten Cilacap, pilihan pada

bentuk usaha kecil dan menengah dipandang rasional karena alasan berikut :

1. Usaha sejenis ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, dalam arti mampu beradaptasi dengan fluktuasi ekonomi di tingkat makro.
2. Usaha ini lebih bersifat absorbtif terhadap tenaga kerja yang tingkat kualifikasinya masih rendah.
3. Barang dan jasa yang ditawarkan diproduksi di tingkat lokal, sehingga kegiatannya mampu memberikan efek pengganda yang besar pada aktivitas ekonomi lainnya di daerah.
4. Karena dikelola oleh masyarakat setempat maka jenis usaha seperti ini mampu menekan kebocoran (leakages) penerimaan dari pariwisata ke luar daerah dan negeri.
5. Usaha sejenis juga mampu mengurangi eksese degradasi mutu lingkungan dibandingkan dengan usaha berskala besar.
6. Jenis usaha kecil dan menengah memiliki sifat on route benefit yang lebih merata atas sumberdaya pariwisata daripada usaha berskala besar.

Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Cilacap ini disesuaikan dengan jangka waktu perencanaan selama 10 tahun yang dibagi dalam 3 tahapan pengembangan, yaitu :

- a. **Tahap I** : Peningkatan dan Revitalisasi Obyek Wisata Berbasis Keunggulan.

Tahapan ini memfokuskan pengembangan pariwisata dengan meningkatkan kualitas dan revitalisasi destinasi wisata strategis yang menjadi ikon pariwisata (obyek

wisata unggulan) di Kabupaten Cilacap. Seperti : THR Teluk Penyu, Benteng Pendem, Pantai Widara Payung, Curug Giriwangi, Gunung Selok, Gunung Srandil, Museum Soesilo Soedarman , Air Panas Cipari.

b. **Tahap II** : Peningkatan Fasilitas Penunjang Wisata dan Diversifikasi Produk Wisata berbasis komunitas.

Tahapan ini memfokuskan pada peningkatan fasilitas infrastruktur dan akomodasi wisata dan fasilitas penunjang lainnya untuk dapat meningkatkan *length of stay* (LoS). Selain itu tahapan ini juga memfokuskan pada pengembangan obyek-obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Cilacap. Seperti : Hutan Payau, Goa Masigit Sela, Pantai Srandil.

c. **Tahap III** : Peningkatan dan Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Cilacap (*Image Development*).

Tahapan ini memfokuskan pada peningkatan citra wisata Kabupaten Cilacap yang saat ini sudah berkembang serta mengembangkan citra wisata Kabupaten Cilacap secara lebih luas. Seperti acara tahunan yang rutin dilakukan di Kabupaten Cilacap. Festival Perahu Naga yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cilacap, bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dengan PODSI (Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia) untuk menyelenggarakan even nasional ini.

Pelaksanaan pengembangan objek wisata juga menemukan beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan pelaksanaan

terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

2. Kebijakan Pengembangan

Kebijakan pengembangan sumber daya wisata yang ada adalah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan untuk menjalankan tahapan pertama tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan revitalisasi produk unggulan, sarana dan prasarana wisata di Kabupaten Cilacap;
2. Meningkatkan amenities dan aksesibilitas ke dan dari DTW potensial di Kabupaten Cilacap;
3. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menarik arus investasi melalui dukungan kebijakan maupun pengembangan infrastruktur dasar yang diperlukan;
4. Meningkatkan pengembangan investasi pada kawasan wisata
5. Meningkatkan pengembangan investasi pada sarana pendukung kepariwisataan;
6. Meningkatkan kemudahan investasi bagi investor dalam maupun luar negeri;
7. Meningkatkan daya saing UKM usaha-usaha peningkatan profesionalitas dan kemampuan SDM UKM;

8. Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kab. Cilacap;
 9. Meningkatkan jaringan kemitraan strategis dan menguntungkan antar pelaku usaha pariwisata dengan upaya kerjasama antara industri besar swasta dengan UKM;
 10. Meningkatkan kemampuan apresiasi dan pemahaman masyarakat dan generasi muda terhadap kekayaan daerah yang dimiliki
- b. Arah kebijakan untuk menjalankan tahapan kedua tersebut di atas adalah :
1. Mendorong upaya diversifikasi, revitalisasi produk-produk unggulan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing produk wisata Kab. Cilacap;
 2. Meningkatkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berbasis keunikan lokal, adat tradisi dan budaya lokal;
 3. Meningkatkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berbasis wisata yang memiliki keunikan;
- c. Arah kebijakan untuk menjalankan tahapan ketiga tersebut di atas adalah :
1. Meningkatkan Citra Pariwisata Kabupaten Cilacap sebagai salah satu destinasi wisata yang aman, nyaman, kompetitif dan mudah untuk dikunjungi melalui berbagai upaya pemasaran;
 2. Meningkatkan posisi dan peran Kabupaten Cilacap dalam

konteks hubungan dan kerjasama pariwisata regional-internasional melalui kegiatan pariwisata di forum lokal, regional internasional atau organisasi kepariwisataan internasional maupun multilateral;

B. Strategi Pengembangan Pariwisata

1. Strategi Pengembangan Produk

- a. Intensifikasi produk untuk sasaran pasar wisatawan yang ada (*eksisting market*)
- b. Pengembangan produk baru untuk sasaran pasar wisatawan yang ada (*eksisting market*)
- c. Pengembangan produk dengan memperluas sasaran pasar baru (*market development*)
- d. Diversifikasi produk untuk sasaran pasar yang lebih luas

2. Strategi Pemasaran dan Promosi

- a. Pengembangan kegiatan pemasaran dilakukan dalam rangka pemasaran terpadu maupun sektoral antar pemerintah.
- b. Pengembangan kegiatan pemasaran produk wisata di Kabupaten Cilacap harus mengacu pada BAURAN PEMASARAN (*marketing mix*) yang meliputi produk (*product*), harga (*price*), lokasi obyek dan daya tarik (*place*) dan promosi (*promotion*).
- c. Intensifikasi Segmen Pasar Eksisting dan Eksplorasi Pasar Potensial
- d. Diferensiasi Produk Melalui Strategi *Positioning*

- e. Penetapan Target Pasar yang Jelas dan Terfokus
- f. Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Bagi Pengembangan Pariwisata Kawasan
- g. Aliansi Strategis dengan Pelaku Pariwisata di tingkat Lokal - Regional

3. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan khusus kepariwisataan
- b. Pengembangan yang ditekankan pada peran serta masyarakat lokal (*local community empowerment*)
- c. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja dari berbagai tingkat yang memiliki kualifikasi dan standar pada umumnya

4. Strategi Pengembangan Kelembagaan

- a. Meningkatkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
- b. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam pengelolaan obyek-obyek wisata
- c. Pengembangan sistem kelembagaan terpadu di tingkat kawasan/wilayah

5. Strategi Pengembangan Investasi dan Pembiayaan

- a. Mengembangkan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi obyek dan jalur prioritas
- b. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif melalui pengembangan masing masing klaster pariwisata

- c. Pengembangan dengan tingkat investasi pihak swasta menengah

- d. Pengembangan dengan tingkat investasi pihak swasta tinggi

C. Pencapaian Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap

Penelitian ini akan memfokuskan pada bidang pengembangan objek wisata, berupa penyediaan sarana dan prasarana yang akan menunjang kegiatan wisata bagi para wisatawan. Salah satu upaya pengembangan pariwisata Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh bidang pengembangan objek wisata adalah program destinasi pengembangan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Cilacap.

Indikator kinerja bidang pengembangan objek wisata dapat dilihat dari data yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tentang program pengembangan destinasi pariwisata yang sudah dilakukan pada tahun 2016 :

1. Pembangunan gazebo komplek wisata THR dan Benteng Pendem
2. Pembuatan lapangan voley pantai depan objek wisata Benteng Pendem
3. Pavingisasi jogging track objek wisata Pantai Congok Jetis Kec. Nusawungu
4. Pedestrian tanggul Teluk Penyu
5. Pembangunan gedung IPTEK Tahap I
6. Pembangunan kios pedagang di Teluk Penyu
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata

D. Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap

Faktor penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap. Hal-hal yang dapat menjadi hambatan tersebut antara lain⁷ :

1. Masih terbatasnya promosi dan pemasaran mengenai produk kepariwisataan, khususnya pada objek-objek pariwisata potensial. Klinger, Benteng Karangbolong.
2. Masih terbatasnya perhatian dan kualitas SDM dalam bidang pariwisata.
3. Banyak objek wisata yang tanahnya bukan milik Pemerintah Kabupaten, khususnya kawasan pantai sehingga dalam pengembangannya dalam pembangunan sarana dan prasarana perlu pemberitahuan kepada pemilik tanah yaitu KODAM IV DIPONEGORO SEMARANG. Beberapa objek wisata yang dikuasai KODAM IV DIPONEGORO yaitu : Pantai Teluk Penyu, Pantai Pasir Putih, Pantai Jetis, Pantai Ketapang Indah, Pantai Indah Widarapayung, Nusakambangan.
4. Banyaknya pedagang yang tidak menginginkan adanya relokasi tempat yang telah disediakan

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap berupa strategi pengembangan produk, strategi pemasaran dan promosi, strategi pengembangan sumberdaya manusia, strategi pengembangan kelembagaan, strategi pengembangan investasi dan pembiayaan. Pencapaian upaya pengembangan objek wisata pada tahun 2016 berupa pembangunan gazebo kompleks wisata THR dan benteng pendem, pembuatan lapangan volley pantai depan objek wisata benteng pendem, pavingisasi jogging track objek wisata pantai Congok Jetis Kec.Nusawungu, Pedestrian tanggul teluk penyu, pembangunan gedung IPTEK tahap I, pembangunan kios pedagang diteluk penyu, pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata.
2. Beberapa hambatan atau kendala yang terdapat dalam proses pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap yaitu, masih terbatasnya promosi dan pemasaran produk kepariwisataan khususnya pada objek wisata potensial, terbatasnya perhatian dan kualitas SDM dalam bidang pariwisata, banyak objek wisata yang tanahnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, banyaknya pedagang yang tidak menginginkan adanya relokasi tempat yang telah disediakan

⁷ Wawancara pada tanggal 19 Januari 2017 dengan Bapak Joko Waluyo, SH., selaku kepala seksi Pengembangan Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran agar pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilaksanakan secara optimal. Berikut saran yang diberikan :

1. Memperluas promosi dan pemasaran objek wisata potensial sehingga dapat memberitahukan kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui tentang objek wisata tersebut. Dan lebih menekankan pada aksesibilitas untuk mempermudah wisatawan dalam mencapai objek wisata serta menambah sarana dan prasarana fasilitas pendukung objek wisata sehingga dapat berkembang secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang tangguh di bidang pariwisata, baik skillnya, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal yang terkait dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi. Dan lebih mengutamakan SDM yang memang menguasai bidang pariwisata.
3. Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan KODAM IV Diponegoro dalam izin membangun sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap
4. Pendekatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap kepada pedagang sekitar agar mau melakukan relokasi tempat yang telah disediakan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, (Jakarta: UI Press 1996)
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukumdan Jurimetri*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
- <http://pariwisata.cilapkab.go.id/>